

SKRIPSI

ANALISIS DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

EVELYN TRIANI MAPANDIN

A011191184



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2023

SKRIPSI

ANALISIS DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh:

EVELYN TRIANI MAPANDIN

A011191184



Kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS UNIVERSITAS
HASANUDDIN MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

ANALISIS DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Disusun dan diajukan oleh:

EVELYN TRIANI MAPANDIN

A011191184

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi :

Makassar, 14 November 2023

Pembimbing I



Prof. H. Marsuki, SE., DEA., Ph.D
NIP. 19600628 198803 1 002

Pembimbing II



Dr. Hamrullah., SE., M.SI., CSF
NIP. 19681221 1995121 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, SE, M.SI CWN®
NIP. 19740715 2000212 1 003

SKRIPSI

ANALISIS DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Disusun dan diajukan oleh:

EVELYN TRIANI MAPANDIN

A011191184

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 14 November 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. H. Marsuki, S.E., DEA., Ph.D	Ketua	1.....
2	Dr. Hamrullah., SE., M.Si., CSF	Sekretaris	2.....
3	Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si., CWM®	Anggota	3.....
4	Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si., CSF	Anggota	4.....

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, SE, M.Si CWM®
NIP. 19740715 2000212 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Evelyn Triani Mapandin

NIM : A011191184

depatemen/program studi : Ilmu Ekonomi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiblanan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 3 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Evelyn Triani Mapandin

PRAKATA

Shalom, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat yang diberikan-Nya kepada penulis sampai hari ini. Atas berkat dan kemurahan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul “**Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Tengah**”. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk menyelesaikan masa studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Banyak suka dan duka yang telah dilewati penulis selama masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini selesai. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca terkait tulisan ini agar skripsi ini dapat berguna lebih baik lagi bagi penulis maupun pembaca.

Penulis berterima kasih sebesar-besarnya kepada banyak pihak yang telah memberi motivasi, cinta, kasih sayang dan dukungan selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan hormat yang tak terhingga kepada mereka, diantaranya :

1. Tuhan Yesus Kristus atas setiap hikmat, kebijaksanaan, kasih setia, penyertaan dan pertolongan kepada penulis dalam setiap langkah kehidupannya hingga saat ini.
2. Kepada kedua orang tua tercinta, papa ganteng Harun Rannu Mapandin dan mama cantik Rina Batara yang selalu ada memberi kasih sayang, mendukung, mendoakan dan memberi nasihat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Juga kepada kakek dan nenek, Daniel

Duma' Batara dan Ludia Lungan yang turut mendoakan dan selalu memberikan dukungan kepada penulis hingga saat ini. Tak lupa juga terima kasih kepada mama Rita, Mama Tahel dan Papa Neo yang selalu mendoakan penulis.

3. Saudara penulis, Vinola Mapandin, Edwin Octavan Mapandin, dan Afriandy Dede Mapandin, yang selalu ada menghibur dan memberi bantuan serta dukungan kepada penulis dalam segala hal.
4. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. beserta jajarannya.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., beserta jajarannya.
6. Ketua Departemen Jurusan Ilmu Ekonomi, Bapak Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM[®] dan Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi, Ibu Dr. Fitriwati, SE., M.Si
7. Kepada Bapak Prof. Drs. H. Marsuki, DEA., Ph.D selaku dosen penasehat akademik sekaligus dosen pembimbing 1 dan Bapak Dr. Hamrullah, SE., M.Si.,CSF selaku dosen pembimbing 2 yang telah membimbing penulis dari nol kepenulisan skripsi ini sampai ke tahap sekarang yaitu dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, telah memberikan waktu dan tenaganya dalam memberikan nasehat serta perbaikan dalam kepenulisan skripsi ini agar lebih baik lagi.
8. Kepada Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si., CWM[®] dan Bapak Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si., CSF selaku dosen penguji pertama dan kedua penulis yang telah memberikan banyak saran, arahan, komentar, serta kritiknya yang membangun pada ujian seminar proposal dan ujian skripsi penulis. Hal tersebut membuat penulis untuk dapat

berkembang lebih baik lagi, serta mendapatkan banyak ilmu seputar Ilmu Ekonomi sendiri.

9. Staff Departemen Ilmu Ekonomi, Pak Oscar dan Ibu Dama, terima kasih karena telah membantu selama mengurus berkas-berkas di departemen dan juga kepada Staff dan Pegawai Akademik, terima kasih banyak untuk bantuannya dalam proses pengurusan berkas mulai dari semester awal hingga semester akhir.
10. Seluruh dosen FEB-UH yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, dan nasehat kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.
11. Untuk JUMAT yang telah memberikan banyak warna dan tempat berbagi dalam suka dan duka (Yusli, Adel, Angel, Fifni, Lia, Pina, Tasha, Caca, Chiko, Cia, Eci, Yunita, Jeni, Yola, Yemima, Ines, Desi).
12. Keluarga besar Ilmu Ekonomi dalam "RUMAH MERAH" HIMAJIE yang telah merangkul, memberi banyak pembelajaran dan mewarnai masa perkuliahan. Saudara dan saudari saya FORMIGA terima kasih telah menjadi rumah yang menyenangkan. Terima kasih juga kepada GRIFFINS yang telah menciptakan momen menyenangkan selama perkuliahan.
13. Keluarga besar PMKO FEB-UH dan Juga teman-teman Gerakan Mahasiswa Kristen Oikumene Komisariat Ekonomi Universitas Hasanuddin yang telah menjadi rumah kedua, menjadi tempat bertumbuh bersama dan menjadi tempat untuk melayani Tuhan.
14. Pengurus senat periode 2022 KABINET RESIST yang telah menciptakan momen berharga sepanjang kepengurusan. Juga kepada teman-teman

MAPERWA periode 2023 yang selalu berbagi tawa sepanjang kepengurusan.

15. KKN gel. 107 Toraja Utara posko 1, terima kasih telah memberikan banyak pengalaman dan kesan yang berharga kepada penulis.

16. Pemilik Nim A21116511 yang telah membantu, memberi dukungan dan menemani penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Akhir kata, penulis mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi kita semua. Tuhan Yesus Memberkati.

Makassar, 3 Agustus 2023

Evelyn Triani Mapandin

ABSTRAK

Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah

Evelyn Triani Mapandin
Marsuki
Hamrullah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitik, yaitu analisis hubungan antar variabel. Penelitian ini menggunakan data sekunder, terdiri dari data deret waktu selama periode 2006-2020 di Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian dengan tingkat signifikansi 5 persen menunjukkan bahwa (1) pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan; (2) pengangguran berpengaruh positif dan tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan; (3) indeks pembangunan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Kata Kunci: Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia

ABSTRACT

The Determinant Factors of Poverty in Central Sulawesi

Evelyn Triani Mapandin
Marsuki
Hamrullah

This study aims to determine the partial effect of economic growth, unemployment and human development index on poverty. This research uses descriptive analytic research method, namely the analysis of the relationship between variables. This study uses secondary data, consisting of time series data for the period 2006-2020 in Central Sulawesi Province. The analytical method used is multiple linear regression. The results of the study with a significance level of 5 percent show that (1) economic growth has no effect on poverty; (2) unemployment has a positive but insignificant effect on poverty; (3) the development index has a negative and significant effect on poverty.

Keywords: *Poverty, Economic Growth, Unemployment, Human Development Index*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Tingkat Kemiskinan	11
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	16
2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	19
2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia.....	22
2.2 Hubungan Antar Variabel	22
2.2.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Kemiskinan.....	24
2.2.2 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Tingkat Kemiskinan.....	25
2.2.3 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Tingkat Kemiskinan	28

2.3 Penelitian Terdahulu.....	30
2.4 Kerangka Pikir.....	32
2.5 Hipotesis Penelitian.....	34
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	35
3.2 Jenis dan Sumber Data	35
3.3 Teknik Pengumpulan Data	35
3.4 Metode Analisis Data	36
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	41
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Perkembangan Umum Variabel Penelitian.....	44
4.1.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan	44
4.1.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi	46
4.1.3 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka.....	48
4.1.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia.....	49
4.2 Hasil Estimasi Penelitian.....	51
4.2.1 Regresi Linear Berganda.....	51
4.2.2 Uji Hipotesis	52
4.2.3 Uji Asumsi Klasik	54
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	56
4.3.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan...56	
4.3.2 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan.....	57
4.3.3 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan.....	59
BAB 5 PENUTUP	61
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Tengah Tahun 2006-2020	5
Tabel 4.1 Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Tengah Tahun 2006-2020	45
Tabel 4.2 PDRB di Sulawesi Tengah Tahun 2006-2020.....	47
Tabel 4.3 TPT di Sulawesi Tengah Tahun 2006-2020.....	48
Tabel 4.4 IPM di Sulawesi Tengah Tahun 2006-2020	50
Tabel 4.5 Hasil Estimasi Regresi Pertumbuhan Ekonomi, TPT, dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	51
Tabel 4.6 Uji t-statistik.....	53
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas.....	54
Tabel 4.8 Hasil Uji multikolinearitas.....	55
Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi.....	55
Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lingkaran Setan Kemiskinan	2
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan utama bagi semua negara berkembang adalah kemiskinan. Isu mengenai kemiskinan merupakan fokus pembangunan di setiap negara, walaupun telah menjadi komitmen global, upaya penanggulangan kemiskinan disadari bukan merupakan hal sederhana, mengingat sifatnya yang kompleks sehingga menjadikan kemiskinan sebagai agenda rutin di setiap tahapan pembangunan di berbagai negara.

Kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar hidup yang rendah yaitu suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat bersangkutan (Suparlan, 1984). Kemiskinan merupakan keadaan saat seseorang tidak berharta, berpenghasilan rendah, kekurangan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal hidup yang layak, seperti sandang, pangan, papan, pelayanan, kesehatan, pelayanan air bersih, dan sanitasi (Wijoto, 2004).

Kemiskinan jika tidak diatasi maka akan terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan (*the vicious circle of poverty*). Lingkaran setan kemiskinan adalah serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi secara sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan tetap mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Menurut Ragnar Nurkse, lingkaran setan kemiskinan menggambarkan bahwa penyebab kemiskinan dikarenakan tabungan rendah, investasi rendah,

kekurangan modal, rendahnya produktivitas, pendapatan yang rendah kembali menyebabkan tabungan rendah dan seterusnya (Prawoto, 2009).

Gambar 1.1 Lingkaran Setan Kemiskinan



Sumber : <https://www.bagi2info.com/lingkaran-setan-kemiskinan/>

Menurut Sharp dalam Kuncoro (2001), ada tiga faktor penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya terbatas dan berkualitas rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah dan juga berarti upah rendah. Penyebab kualitas sumber daya manusia rendah adalah tingkat pendidikan yang rendah, nasib yang kurang beruntung, diskriminasi, atau keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul karena perbedaan akses dan modal.

Adapun terjadinya kemiskinan diantaranya disebabkan oleh keterbelakangan manusia dan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam sangat bergantung pada kemampuan produktif manusia. Jika penduduknya banyak yang miskin dan berpendidikan rendah maka akan mengakibatkan langkanya keterampilan teknik, pengetahuan, dan aktivitas kewiraswastaan yang

secara otomatis akan menyebabkan sumber daya alam yang tersedia justru terbengkalai, tidak berkembang, atau bahkan salah guna. Sumber daya alam ini akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, kurangnya sumber daya alam adalah sumber utama kebutuhan hidup manusia. Kemiskinan sumber daya merupakan sebab dan sekaligus akibat kemiskinan manusia (Jhingan, 2016).

Selanjutnya, penyebab lain dari kemiskinan adalah kurangnya sumber daya manusia. Jika manusia tidak memiliki keterampilan maka ia tidak akan memiliki pendapatan yang menyebabkan daya belinya berkurang sehingga masuk ke dalam lingkaran kemiskinan. Ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah bahkan negara. Sumber daya manusia akan mempengaruhi IPM dan dapat mempengaruhi tingkat pengangguran.

Nurkse (2006) menjelaskan dua lingkaran perangkap kemiskinan dari segi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Segi penawaran menjelaskan bahwa tingkat pendapatan masyarakat yang rendah menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Rendahnya kemampuan menabung masyarakat menyebabkan tingkat pembentukan modal (investasi) rendah, sehingga terjadi kekurangan modal dan dengan demikian tingkat produktivitas juga akan rendah, begitu seterusnya. Sedangkan dari segi permintaan menjelaskan di negara-negara yang miskin rangsangan untuk menanamkan modal sangat rendah karena keterbatasan luas pasar untuk berbagai jenis barang. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pendapatan masyarakat karena tingkat produktivitasnya yang juga rendah, sebagai akibat dari tingkat pembentukan modal yang terbatas di masa lalu. Pembentukan modal yang terbatas ini disebabkan kekurangan rangsangan untuk menanamkan modal.

Indonesia merupakan negara berkembang yang juga tengah mengatasi masalah kemiskinan. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak

kekayaan akan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Namun tidak bisa dihindari banyaknya sumber daya ini jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya yang ada maka akan memunculkan gap yang berimbas pada peningkatan kemiskinan.

Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial penduduk negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial dan ekonominya. Kesejahteraan umum di Indonesia dapat digambarkan salah satunya berdasarkan tingkat kemiskinan. Terdapat hubungan negatif antara kesejahteraan umum dengan tingkat kemiskinan di Indonesia. Semakin rendah tingkat kemiskinan menggambarkan semakin tinggi kesejahteraan penduduk. Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

Pemerintah Indonesia mempunyai konsep yang lebih jelas tentang kemiskinan. Hal tersebut terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 yaitu kemiskinan adalah persoalan yang kompleks, tidak hanya dalam hal terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, akan tetapi karena adanya ketiadaan hak dalam memperoleh kebutuhan yang ada. Hal tersebut meliputi tersedianya persediaan kebutuhan pokok yang baik serta cukup untuk dikonsumsi, jangkauan dari lokasi tempat tinggal, dari sisi harga, dan adanya jaminan ketersediaan sepanjang waktu dari kelangkaan. Oleh sebab itu, pemerintah menganggap kemiskinan sebagai suatu masalah yang multidimensi, bukan saja terkait masalah kurangnya pendapatan dan sumber daya ekonomi akan tetapi juga terkait dengan non ekonomi antara lain kesehatan, sosial, budaya dan lain sebagainya.

Permasalahan kemiskinan yang terjadi merambat ke setiap daerah di seluruh Indonesia, salah satunya Provinsi Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah adalah salah satu provinsi yang berada di Kawasan Timur Indonesia, dimana provinsi ini menjadi salah satu penghasil nikel terbesar di Indonesia. Tidak hanya itu, Sulawesi Tengah juga memiliki keunggulan dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta lapangan usaha sektor industri. Walaupun Sulawesi Tengah memiliki keunggulan, namun masih sering kali menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, sehingga diperlukan analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah ini. Berikut data persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2010-2020 :

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun	Persentase Penduduk Miskin
2006	28,08
2007	25,53
2008	27,92
2009	24,66
2010	19,47
2011	15,83
2012	14,94
2013	14,32
2014	13,61
2015	14,66
2016	14,45
2017	14,14
2018	14,01
2019	13,48
2020	12,92

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah 2021

Berdasarkan pada tabel 1.1, dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan dari tahun 2006-2020, meskipun masih menempati sepuluh besar provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di

Indonesia. Dari tahun 2006 ke 2007 mengalami penurunan sebesar 2,55% yaitu pada angka 28,08% pada tahun 2006 kemudian menjadi 25,53 pada tahun 2007. Namun pada tahun 2008, tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah kembali naik pada angka 27,92%. Kemudian pada tahun 2009 kembali mengalami penurunan di angka 24,66% yang kemudian tren penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah berlanjut sampai pada tahun 2014 di angka 13,61%. Selanjutnya pada tahun 2015-2020, tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami fluktuasi. Dapat dilihat bahwa persentase tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah paling tinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 28,08% dan paling rendah pada tahun 2020 sebesar 12,92%.

Kemiskinan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berhubungan salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan kemiskinan untuk menurunkan angka kemiskinan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai nilai dari pembangunan manusia merupakan suatu hal yang penting dalam pengentasan kemiskinan. Indeks pembangunan manusia menggambarkan bagaimana kualitas sumber daya yang dimiliki suatu daerah, jika kualitas sumber daya manusia buruk akan mengakibatkan penerimaan angkatan kerja menurun, sehingga akan menyebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tinggi dan berdampak lagi terhadap peningkatan kemiskinan dan begitu sebaliknya.

Didalam teori William Arthur Lewis dijelaskan bahwa tujuan dari proses pembangunan khusus ditujukan bagi negara yang menghadapi masalah kelebihan tenaga kerja. Lewis menganggap di negara berkembang terdapat tenaga kerja

yang berlebih, tetapi memiliki masalah kekurangan modal dan keluasan tanah yang terbatas (Sukirno, 2006).

Pengangguran memiliki hubungan yang sangat erat dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Baik negara berkembang maupun negara maju, pengangguran merupakan suatu keadaan yang keberadaannya tidak terelakkan. Pengangguran memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan sebab pengangguran sangat berpengaruh terhadap terjadinya masalah kerawanan berbagai tindak kriminal, gejolak sosial, politik dan kemiskinan.

Menurut Sukirno (2006) pengangguran dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat yang telah dicapai, yang akan menyebabkan rendahnya tingkat kemakmuran masyarakat. Apabila lapangan pekerjaan tidak dapat menyerap semua angkatan kerja yang ada maka akan menambah jumlah pengangguran (Machmud, 2016).

Berbicara tentang pengangguran, tidak lepas dari jumlah penduduk yang ada pada setiap daerah. Sulawesi Tengah merupakan provinsi terluas di Pulau Sulawesi, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak urutan di Pulau Sulawesi, setelah Sulawesi Selatan, yang artinya semakain banyak jumlah penduduk maka akan semakin banyak pula jumlah tenaga kerja yang tersedia.

Jumlah pengangguran yang meningkat akan menimbulkan berbagai dampak pada proses pembangunan ekonomi. Agar tidak terus berlanjut, pemerintah harus mengatasi pengangguran, sebab persoalan pengangguran merupakan persoalan utama dan sensitif bagi kestabilan ekonomi. Pengangguran dapat menimbulkan pengaruh yang sangat berbahaya jika tidak segera diatasi. Pengangguran dapat berpengaruh dalam bidang ekonomi, sosial, maupun secara individual pada pelaku pengangguran itu sendiri.

Peningkatan jumlah pengangguran tidak lepas dari rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat, hal ini dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan (Suharto, 2009). Rendahnya kualitas tersebut dapat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ketika IPM rendah maka akan berdampak pada rendahnya produktivitas kerja. Hal ini berdampak pada perolehan pendapatan yang rendah dan juga tingkat penerimaan angkatan kerja akan berkurang karena kualitas sumber daya manusia yang rendah.

Menurut BPS (2009), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM merupakan indikator strategis yang banyak digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di seluruh wilayah. IPM dipandang sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan selama beberapa tahun sebelumnya.

Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas SDMnya. Komposisi IPM berdasarkan tiga indikator yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, tiga indikator inilah yang perlu untuk ditingkatkan agar kualitas SDM dapat mengalami peningkatan. Peningkatan pendidikan sering sekali dikaitkan dengan peningkatan pendapatan yang diperoleh. Apabila pendapatan mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maupun pengalaman pelatihan, semakin tinggi produktivitasnya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi nasional semakin tinggi. Selain pendidikan, kesehatan juga memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan. Pengaruh kesehatan terhadap pendapatan diantaranya dengan perbaikan kesehatan penduduk akan meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Perbaikan kesehatan juga dapat membawa perbaikan dalam tingkat pendidikan dan pengembangan

potensi diri yang kemudian menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya pendapatan.

Dengan berbagai masalah yang ada, secara langsung akan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk melihat apakah pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan Di Sulawesi Tengah**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah?
2. Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah?
3. Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah
3. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk penulis yaitu sebagai sarana pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan penerapan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama masa perkuliahan.
2. Untuk akademis sebagai sarana pembelajaran dan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
3. Untuk pemerintah yaitu sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan untuk meminimalisir masalah kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Menurut Ragnar Nurske, arti dari kemiskinan adalah hal yang sering menjadi masalah di berbagai negara atau daerah berkembang. Hal ini diakibatkan oleh kapasitas yang kecil dalam tabungan menyebabkan income riil yang rendah, dimana jika income riil rendah maka menunjukkan produktivitas yang rendah juga. Jika terjadi terus menerus, hal ini akan berputar dan menjadikan kapital menjadi berkurang. Secara umum, kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana tidak tercukupinya kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Menurut Bank Dunia, kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memperoleh standar hidup yang minimal atau kemiskinan dapat juga diartikan mengenai keadaan melarat dan ketidakberuntungan atau suatu keadaan minus (deprivation). Kemiskinan juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan dan kepemilikan harta, kelemahan fisik, isolasi, kerentanan dan ketidakberdayaan (Chambers, 1987). Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan itu adalah suatu kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi makanannya kurang dari 2100 kalori per kapita sehari.

Kemiskinan merupakan suatu standar hidup yang rendah maupun ketidakmampuan dari segi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keadaan tersebut diketahui melalui pendapatan yang rendah untuk mencukupi kebutuhan pokok maupun lainnya. Dari pendapatan yang rendah tersebut berakibat terhadap kemampuan seseorang untuk mencukupi standar hidup rata-

rata antara lain standar kesehatan serta pendidikan. Menurut Todaro (2006) kemiskinan terjadi saat seseorang atau sekelompok orang tidak sanggup memenuhi kebutuhan ekonomi dan standar hidup tertentu. Sedangkan tingkat kemiskinan adalah persentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara.

Wignjosoebroto *et al.*, dalam Suyanto (2013) menyatakan bahwa seseorang atau keluarga yang dijejaskan kemiskinan, mereka umumnya tidaklah banyak berdaya, ruang geraknya serba terbatas, dan cenderung kesulitan untuk terserap dalam sektor-sektor yang memungkinkan mereka dapat mengembangkan usahanya. Jangankan untuk mengembangkan diri menuju ke taraf sejahtera, untuk bertahan menegakkan hidup fisiknya pada taraf yang subsisten bagi keluarga miskin hampir-hampir merupakan hal yang mustahil bila tidak ditopang oleh jaringan dan pranata sosial di lingkungan sekitarnya. Sedangkan Robert Chambers menyatakan, inti dari masalah kemiskinan dan kesenjangan sebenarnya terletak pada apa yang disebut *deprivation trap* atau "perangkap kemiskinan". Menurut Chambers (1987) rumah tangga miskin dan lingkungannya terjebak dalam satu mata rantai, Mata rantai ini kadang-kadang disebut sebagai lingkaran setan, sindrom kemiskinan, atau perangkap kemiskinan. Permasalahan kemiskinan yang dialami oleh keluarga miskin tidak hanya di dominasi oleh unsur kekurangan materi semata melainkan juga terdapat unsur-unsur lain dalam kemiskinan mereka yaitu unsur kelemahan jasmani, keadaan terasing (isolasi), rentan dan tidakberdaya yang tentu saja keadaan tersebut menimpa keluarga miskin dengan kadar penderitaan yang berbeda satu dengan yang lainnya (Arifiyanto, 2002).

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, BPS (2007) menggunakan tiga indikator kemiskinan, yaitu 1. *Head Count Index*, yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. 2. *Poverty Gap Index* (Indeks Kedalaman Kemiskinan) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. 3. *Poverty Severity Index* (Indeks Keparahan Kemiskinan) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Dari ketiga pendekatan tersebut Kuncoro (2006) menyatakan bahwa cara yang paling sederhana untuk mengukur kemiskinan adalah dengan ukuran *Head Count Index*.

Kemiskinan dapat dikelompokkan atas bentuk-bentuk kemiskinan. Bentuk-bentuk kemiskinan ini juga dapat dipandang sebagai faktor penyebab terjadinya kemiskinan (asal mula kemiskinan), yaitu kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural.

Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang terjadi memang dari awalnya telah miskin. Kelompok masyarakat ini menjadi miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan. Meskipun mereka ikut serta dalam pembangunan, imbalan pendapatan yang mereka peroleh juga relatif rendah. Kemiskinan natural ini adalah kemiskinan yang lebih disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam (Ismanto, 1995). Konsep kemiskinan kultural pertama kali diperkenalkan oleh Oscar Lewis yang melihat bahwa kemiskinan dapat muncul sebagai akibat nilai-nilai dan kebudayaan yang dianut oleh kaum miskin itu sendiri (Effendi, 1992).

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang

cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Kemiskinan struktural ini pada dasarnya bersumber dari berbagai program dan kebijakan yang tidak terarah dalam pelaksanaannya. Karena pelaksanaan yang tidak terarah tersebut menyebabkan kepemilikan sumber daya tidak merata, kesempatan yang tidak sama menyebabkan keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata pula sehingga menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. Hal ini disebut “accidental poverty”, yaitu kemiskinan karena dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat (Baswir, 1995).

Kemiskinan menurut pola waktu dibedakan atas empat pengertian, yaitu :

(a) *persistent poverty* yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun-temurun. Kemiskinan ini pada umumnya terjadi di daerah yang kritis sumber daya alam atau daerah yang terisolasi; (b) *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan; (c) *seasonal poverty* yaitu kemiskinan musiman seperti yang sering dijumpai pada petani dan nelayan, serta (d) *accidental poverty* yaitu kemiskinan yang terjadi karena bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Dari segi keadaan penduduk, penentuan penduduk miskin tetap berdasar pada garis kemiskinan. Adapun potensi wilayah digunakan untuk menetapkan wilayah-wilayah atau desa-desa yang dikategorikan sebagai wilayah atau desa tertinggal. Meskipun demikian, penduduk miskin umumnya erat kaitannya dengan wilayah miskin. Dengan kata lain, wilayah dengan potensi tertinggal atau kurang berkembang juga menyebabkan penduduknya miskin.

Masalah kemiskinan yang terjadi antar suatu daerah dengan daerah lain pasti berbeda. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan meliputi faktor

ekonomi, faktor sosial, faktor struktural (politik), dan lain–lain. Kemiskinan identik dengan negara yang sedang berkembang, dimana permasalahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mengakibatkan negara sedang berkembang sulit untuk maju. Sharp, dkk (1996) dalam Kuncoro (2006) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi:

- 1) Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
- 2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berdampak pada produktivitas yang rendah, dan kemudian mengakibatkan upah yang diterima juga rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.
- 3) Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (**vicious circle of poverty**). Teori ini ditemukan oleh Ragnar Nurkse, yang mengatakan: *“a poor country is poor because it is poor”* (negara miskin itu miskin karena dia miskin). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai macam jenis barang kepada penduduknya. Adanya kemajuan atau penyesuaian - penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologi terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada menentukan kenaikan kapasitas itu sendiri (Boediono, 1999). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek. Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis didasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonom klasik antara lain Adam Smith, David Ricardo. Hal tersebut menjadikan pertumbuhan ekonomi dicirikan dengan 3 hal pokok, antara lain: a). Laju pertumbuhan perkapita dalam arti nyata (riil); b). Distribusi atau persebaran angkatan kerja menurut sektor kegiatan produksi yang menjadi sumber penghasilannya; c). Pola sebaran penduduk. Teori lain yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah teori ekonomi modern. Teori pertumbuhan Harrod Domar merupakan salah satu teori pertumbuhan ekonomi modern, teori ini menekankan arti pentingnya pembentukan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi maka akan semakin baik perekonomian, investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat tetapi juga terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam

perspektif yang lebih panjang investasi akan menambah stok kapital (Yotopoulos, 1997; Boediono, 1999).

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator untuk mengukur prestasi ekonomi suatu negara (Dewi, 2017). Pertumbuhan ekonomi diartikan dengan bertambahnya jumlah barang dan jasa yang diproduksi sebagai akibat dari berkembangnya kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat (Sukirno, 2006). Disebut sebagai pertumbuhan dikarenakan adanya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi merupakan implikasi dari kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah laju pertumbuhan dari berbagai macam sektor ekonomi dan indikator penting bagi suatu negara atau daerah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan. Adanya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan peningkatan aktivitas perekonomian sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini dikarenakan aktivitas perekonomian pada dasarnya adalah proses untuk menghasilkan output dan selanjutnya akan memberikan balas jasa berupa pendapatan kepada masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut.

Sukirno (2006), mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan nasional atau daerah sendiri adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu, secara konseptual nilai tersebut dinamakan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat wilayah (regional).

Teori *trickle down effect* yang artinya adalah kemajuan perekonomian yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan terciptanya distribusi hasil perekonomian yang secara merata. Suatu negara yang menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi harus melakukan peningkatan dalam kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti ada perkembangan ekonomi secara fisik. Perkembangan ekonomi fisik yang dimaksud adalah penambahan produksi barang dan jasa serta perkembangan infrastruktur. Suatu negara jika mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dapat dikatakan negara tersebut sejahtera. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi indikator dari berhasilnya kegiatan ekonomi dan pembangunan suatu negara yang juga menggambarkan perubahan aktivitas ekonomi.

Dalam buku Todaro (2000), ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu : (1) Akumulasi modal, meliputi segala bentuk atau jenis dalam investasi baru yang ditanamkan pada tanah seperti rumah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia atau yang disebut dengan modal; (2) Pertumbuhan penduduk, seiring berjalannya waktu jumlah penduduk akan bertambah karena adanya penambahan penduduk. Banyaknya penduduk di tahun yang akan datang akan menambah angkatan kerja dan lapangan kerja; (3) kemajuan teknologi, semakin modernnya teknologi akan membantu proses pertumbuhan ekonomi lebih cepat.

Menurut Badan Pusat Statistik (dalam Prawesti, 2021) bahwa PDB pada tingkat nasional dan PDRB tingkat regional merupakan gambaran dari kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan nilai tambah dalam periode waktu tertentu. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam menentukan nilai PDB

maupun PDRB yaitu pendekatan lapangan usaha dan pendekatan pengeluaran yang dihitung atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

Perhitungan dengan pendekatan lapangan usaha merupakan jumlah komponen nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh aktivitas produksi sektor-sektor ekonomi. Sedangkan pendekatan pengeluaran menunjukkan penggunaan nilai tambah tersebut. Perhitungan PDB dan PDRB atas dasar harga konstan memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun, sementara perhitungan atas dasar harga berlaku memberikan gambaran terkait dengan pergeseran struktur ekonomi suatu wilayah.

2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerja atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Menurut Sukirno (1994), pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah kurangnya pengeluaran agregat.

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Menurut Sukirno (2000) pengangguran dibedakan menjadi empat jenis berdasarkan penyebabnya antara lain: a). Pengangguran Alamiah yakni pengangguran yang berlaku pada tingkat kesempatan kerja penuh. Kesempatan kerja penuh (*full employment*) adalah keadaan dimana seseorang sekitar 95 persen dari angkatan

kerja mampu dan bersedia dalam suatu waktu sepenuhnya untuk bekerja.

Pengangguran sebanyak 5 persen inilah yang dinamakan sebagai pengangguran alamiah; b). Pengangguran Friksional yakni suatu jenis pengangguran yang sifatnya sementara disebabkan adanya kendala waktu, informasi, dan kondisi antara pencari kerja dengan penerima lowongan pekerjaan. Mereka yang menganggur bukan karena tidak memperoleh pekerjaan tetapi tindakan seorang pekerja meninggalkan pekerjaannya demi mencari pekerjaan yang lebih baik atau lebih sesuai dengan keinginannya; c). Pengangguran Struktural yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi. Tiga sumber utama yang menjadi penyebab berlakunya pengangguran struktural adalah perkembangan teknologi, kemunduran yang disebabkan oleh adanya persaingan dari luar negeri atau daerah lain, dan kemunduran perkembangan ekonomi suatu kawasan sebagai akibat dari pertumbuhan yang pesat dikawasan lain; d). Pengangguran Konjungtur yaitu pengangguran yang melebihi pengangguran alamiah. Pengangguran ini disebabkan oleh perubahan gelombang (naik turunnya) kehidupan perekonomian. Pada saat perekonomian mengalami masalah resesi (kemunduran) dan masa depresi (kehancuran) yang berakibat pada pengurangan dalam permintaan agregat. Penurunan permintaan agregat mengakibatkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau gulung tikar, sehingga muncul pengangguran konjungtur.

Selanjutnya Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di Indonesia dimana dijelaskan jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya:

- a) Pengangguran Terbuka yakni terciptanya akibat penambahan pertumbuhan kesempatan kerja yang lebih rendah daripada pertumbuhan tenaga kerja, akibatnya banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh

pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja;

- b) Pengangguran Tersembunyi yakni terjadinya karena kelebihan tenaga kerja dalam satu unit yang diperlukan. Padahal dengan mengurangi tenaga kerja sampai jumlah tertentu tidak akan mengurangi jumlah produksi. Pengangguran ini biasanya terjadi di sektor pertanian atau jasa,
- c) Pengangguran Musiman yakni keadaan pengangguran yang terjadi pada masa-masa tertentu dalam satu tahun. Pengangguran ini biasanya terjadi di sektor pertanian. Petani akan menganggur saat menunggu masa tanam dan kembali bekerja saat musim tanam atau musim panen,
- d) Setengah Menganggur yakni keadaan dimana seseorang tidak bekerja secara optimal dibawah jam kerja normal karena tidak adanya lapangan pekerjaan. Menurut Undang-Undang ini, jam kerja normal untuk karyawan adalah 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam seminggu. Sedangkan untuk karyawan dengan 5 hari kerja dalam seminggu kewajiban kerja mereka 8 jam dalam sehari dan 40 jam dalam seminggu.

Pengangguran merupakan seseorang yang telah dikategorikan sebagai angkatan kerja secara aktif sedang mencari pekerjaan akan tetapi tidak memperoleh pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 mengenai Ketenagakerjaan pada tanggal 01 Oktober 1998, tenaga kerja diartikan sebagai penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Perlu diketahui bahwa Indonesia tidak menetapkan batas usia maksimum tenaga kerja, disebabkan Indonesia belum memiliki jaminan sosial nasional.

Menurut Rukmana (2012) tenaga kerja dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

- 1) Angkatan kerja, yang merupakan bagian dari masyarakat yang bekerja, masyarakat yang menganggur serta sedang mencari pekerjaan.
- 2) Bukan angkatan kerja, yang merupakan bagian dari masyarakat yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lain sebagainya .

Todaro (2000) mengungkapkan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dinyatakan sebagai pendorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jumlah angkatan kerja yang semakin tinggi berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi akan menambah ukuran pasar domestiknya. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa semakin tinggi jumlah angkatan kerja yang dipakai dalam proses produksi maka output hasil produksi akan mengalami kenaikan sampai waktu tertentu.

Pengangguran dapat dikatakan sebagai seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja yang tidak bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan. Oleh karena itu, Sukirno (2004) mengelompokkan pengangguran menurut keadaan yang menyebabkannya menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) Pengangguran friksional, yakni pengangguran yang terjadi akibat tidak bertemunya antara pembuka lowongan kerja dengan pencari kerja yang disebabkan oleh kurangnya informasi, geografi dan lainnya.
- 2) Pengangguran struktural, yakni pengangguran yang terjadi akibat adanya perubahan struktur perekonomian.
- 3) Pengangguran konjungtur, yakni pengangguran yang terjadi akibat meningkatnya pengangguran alamiah.

Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh tidak sempurnanya pasar tenaga kerja, Atau tidak mempunyai pasar tenaga kerja menyerap tenaga kerja yang tersedia. Akibatnya muncul suatu kelompok tenaga kerja yang diuntungkan dalam aktivitas perekonomian. Hal tersebut merupakan akibat tidak langsung dimana penawaran tenaga kerja telah melebihi permintaan tenaga kerja berdasarkan kesempatan kerja yang tersedia.

Indikator yang sering dipakai untuk mengukur tingkat pengangguran yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tingkat pengangguran terbuka biasanya diartikan sebagai jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, jumlah tersebut dipakai untuk mengidentifikasi banyaknya penawaran kerja yang tidak bisa terserap oleh pasar kerja di suatu daerah.

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu : (1) penduduk yang aktif mencari kerja, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Menurut Kuncoro (2010), pengangguran terbuka adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Kehilangan pekerjaan dapat dianggap sebagai penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi, tidaklah mengejutkan jika pengangguran terbuka menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik, dan para politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu adanya peningkatan pada pembangunan manusia. Pembangunan manusia merupakan suatu konsep dari pembangunan yang berfokus pada manusia dan kesejahteraan manusia. Konsep ini meliputi berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan, dan kesejahteraan. Konsep pembangunan manusia dimana menempatkan manusia sebagai sumber daya yang menjadi kekayaan bangsa yang sangat penting dan utama di samping sumber daya lain. Untuk menilai tingkat pembangunan manusia maka digunakanlah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Menurut Badan Pusat statistik, Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu ukuran untuk menilai tingkat keberhasilan atau pencapaian dari dimensi utama pembangunan manusia di wilayah tertentu. Indeks ini dinilai menggunakan dimensi pokok dari pembangunan manusia yang terdiri dari umur panjang serta hidup yang sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Indeks Pembangunan Manusia (Todaro dan Smith, 2013) mencoba untuk memeringkat semua negara atau daerah dari skala 0 (IPM terendah) hingga 1 (IPM tertinggi) berdasarkan tiga tujuan atau produk akhir IPM:

- 1) Masa hidup yang diukur dengan usia harapan hidup,
- 2) Pengetahuan yang diukur dengan kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang (dua pertiga) dan rata-rata sekolah (satu pertiga),
- 3) Standar kehidupan yang diukur dengan pendapatan riil perkapita, disesuaikan dengan disparitas daya beli dari mata uang setiap 33 negara untuk mencerminkan biaya hidup dan untuk memenuhi asumsi utilitas yang semakin menurun dari pendapatan.

IPM mengindikasikan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan

sebagainya. IPM merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu hidup sehat dan umur panjang, pengetahuan, dan standar hidup layak (Prasetya et al. 2022).

IPM memiliki rentang nilai 1-100 dan suatu wilayah dikatakan memiliki IPM yang baik jika nilai dari indikator tersebut mendekati 100. Nilai IPM dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori, yakni:

- a) IPM kelompok “rendah” dengan kriteria nilai $IPM < 60$,
- b) IPM kelompok “sedang” dengan kriteria nilai $60 \leq 70$,
- c) IPM kelompok “tinggi” dengan kriteria $70 \leq 80$,
- d) IPM kelompok “sangat tinggi” dengan kriteria nilai $IPM \geq 80$.

Dimensi kesehatan serta umur panjang dapat dilihat dari angka harapan hidup. Dimensi pendidikan dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah, dan standar hidup yang layak dapat dilihat melalui pengeluaran perkapita serta paritas daya beli.

Pembangunan yang dapat mempengaruhi kondisi fisik manusia terlihat dalam angka harapan hidup dan kemampuan daya beli, sedangkan dalam kondisi non fisik tercermin dari kualitas pendidikan masyarakat. Oleh sebab itu diharapkan suatu daerah yang memiliki tingkat IPM yang tinggi seharusnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dengan kata lain jika tingkat IPM tinggi, pastinya tingkat kemiskinan juga rendah.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Kemiskinan

Teori *trickle-down effect* Lewis (1954) menjelaskan bahwa kemakmuran yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah

sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang merata. Pada penelitian yang dilakukan Wahyuniarti (2008) dijelaskan didalamnya bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai indikator yang sangat penting untuk melihat keberhasilan pembangunan di suatu negara maupun daerah sebagai syarat untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Syarat keberhasilan pertumbuhan ekonomi adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut dapat menyebar disetiap golongan masyarakat, tidak hanya menyebar di golongan penduduk kaya tetapi juga menyebar di golongan penduduk miskin. Pertumbuhan penduduk dan kebutuhan investasi terjadi di banyak negara hal ini dilakukan karena kekhawatiran yang berkembang mengenai pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran yang meningkat.

Pertumbuhan ekonomi yang efektif merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Menurut Kuznet, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang (Todaro, 2003). Selain itu pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya distribusinya akan membaik.

2.2.2 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Tingkat Kemiskinan

Pengaruh buruk dari pengangguran terhadap kemiskinan menurut Sukirno, (2004) adalah pendapatan masyarakat berkurang karena tidak memiliki pekerjaan yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai

seseorang. Kesejahteraan masyarakat semakin menurun karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Bila pengangguran yang terjadi di suatu negara sangat buruk, hal ini dapat berdampak pada kekacauan politik, sosial, menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Terdapat hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dengan luasnya kemiskinan. Menurut sebagian besar dari mereka yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja paruh waktu (*part time*) selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Mereka yang bekerja dengan gaji yang tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara golongan masyarakat kelas menengah keatas. Dengan demikian, salah jika beranggapan bahwa setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Hal tersebut karena kadangkala ada pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya sangatlah susah. Mereka menolak pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka.

Menurut Tambunan (2001), pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan berbagai cara antara lain:

- a. Apabila rumah tangga tidak menghadapi batasan likuiditas yang artinya konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka masalah pengangguran akan secara langsung mempengaruhi tingkat pendapatan kemiskinan dengan tingkat konsumsinya.

- b. Apabila rumah tangga tidak menghadapi batasan likuiditas yang artinya konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek.

2.2.3 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Tingkat Kemiskinan

UNDP (*United Nations Development Programme*) pertama kali memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dijalankan pemerintah pada tahun sebelumnya. IPM mengukur dan menunjukkan kemajuan program pembangunan di awal dan akhir dalam suatu periode tersebut. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan seperti memperoleh pendapatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya (Sinaga, 2009; Mankiw, 2016). Didalam teori pertumbuhan baru dijelaskan pentingnya peranan dari pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*), mendorong berbagai penelitian, dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Hal ini dapat terlihat dari investasi pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibuktikan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keterampilan mendorong peningkatan produktivitas orang tersebut. Perusahaan akan memperoleh imbal balik dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja sehingga produktivitas yang dihasilkan tinggi dan perusahaan tidak berkeberatan memberikan gaji yang lebih tinggi bagi para pekerjanya. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan keterampilan dan keahlian akan mampu meningkatkan

hasil produktivitas pertanian, karena dengan tenaga kerja yang terampil maka akan dapat bekerja secara efisien. Seseorang yang memiliki keahlian dan produktivitas yang tinggi kesejahteraannya akan meningkat. Hal ini bisa dibuktikan dari peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan sebagainya (Sinaga, 2009).

Indeks pembangunan manusia menjadi tolak ukur pembangunan suatu wilayah sebaiknya berkorelasi positif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut karena diharapkan suatu daerah yang memiliki nilai indeks pembangunan manusia tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai indeks pembangunan manusia tinggi, maka seharusnya tingkat kemiskinan rendah.

Indeks pembangunan manusia dapat dikatakan sebagai gambaran dari kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia dapat menjadi faktor utama terjadinya kemiskinan. Menurut Mudrajad (2006) IPM berguna untuk membandingkan kinerja pembangunan manusia baik antar daerah maupun negara. Berdasarkan komponen yang terdapat di dalam indeks pembangunan manusia, peningkatan pendidikan seseorang sering dikaitkan dengan pendapatan yang diperoleh. Selain itu perbaikan dalam kesehatan penduduk yang akan meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Apabila hal tersebut terjadi maka akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan meningkatkan pengeluaran untuk konsumsinya, saat pengeluaran untuk konsumsinya meningkat, maka hal tersebut mengindikasikan tingkat kemiskinan akan menurun. Disisi lain rendahnya indeks pembangunan manusia berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Rendahnya produktivitas berakibat pada rendahnya perolehan

pendapatan, sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Febriana Rahma Atu Fitria (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Pulau Jawa Tahun 2011-2017”. Tujuan penelitian ini untuk melihat pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan. Penelitian ini menggunakan model regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi direspon oleh tingkat kemiskinan namun tidak signifikan, IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, TPT berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan.

Ari Kristin Prasetyoningrum dan U. Sulia Sukmawati (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. Tujuan Penelitian tersebut untuk mengetahui pengaruh IPM, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap kemiskinan. Penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross section*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan dikarenakan nilai probabilitas 0.23 yang melebihi tingkat probabilitas 5%, pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai jalur 0.14 dan signifikan dengan probabilitas 0.0035 karena tingkat probabilitas kurang dari 5%.

Anggi Aprillia (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Di Malang Raya Tahun 2014-2013)”. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM dan TPT terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian tersebut menggunakan teknik analisis regresi data panel dengan pendekatan *fixed effect model*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Malang Raya adalah variabel indeks pembangunan manusia (IPM). Sedangkan, variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan adalah variabel pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka (TPT).

Reki Ardian dkk (2021) meneliti “ ” hasil penelitian tersebut menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia secara individual berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Ridho Andykha dkk (2018) meneliti “Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah” hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, IPM yang direpresentasikan oleh IPM tahunan berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kemiskinan dan pengangguran yang direpresentasikan oleh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Dewi Martini dan nenik Woyanti (2022) meneliti “Analisis Pengaruh PDRB, IPM dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan 35 kabupaten/kota Di Provinsi Jawa Tengah (2016-2020). Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2016 sampai 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah regresi data panel, dan digunakan data sekunder dengan jumlah sampel sebanyak 175. Hasil penelitian, dua variabel independen yaitu PDRB dan IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan, sedangkan Pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Pertumbuhan PDRB dan IPM telah dapat dimanfaatkan dengan baik, namun penurunan pengangguran belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian melihat hubungan yang logis antara landasan teori dengan kajian empiris dari suatu penelitian. Kerangka pikir dalam penelitian ini memuat diantaranya beberapa faktor seperti (1) Pertumbuhan ekonomi, (2) Indeks Pembangunan Manusia, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Tengah. Variabel-variabel dependen dan independen tersebut akan mengarahkan peneliti untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian untuk memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah.

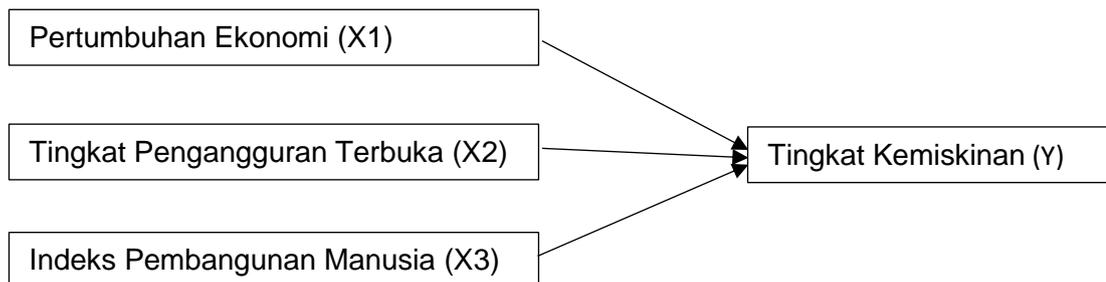
Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator yang sangat penting untuk melihat keberhasilan pembangunan di suatu negara maupun daerah sebagai syarat untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Syarat keberhasilan pertumbuhan ekonomi adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut dapat menyebar disetiap golongan masyarakat, tidak hanya menyebar di golongan penduduk kaya tetapi juga menyebar di golongan penduduk miskin. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat mestinya tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat, namun kenyataannya masih banyak masyarakat miskin, kesenjangan makin melebar, distribusi pendapatan tidak merata dan masih terjadi defisit anggaran. Dalam penelitian Dewi Martini dan Nenik Woyanti (2022) menjelaskan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi akan diikuti oleh menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.

Selanjutnya indikator tingkat pengangguran terbuka yang dimana pengangguran merupakan indikator yang sangat terkait dengan pendapatan. Masyarakat yang menganggur, pasti tidak memiliki pendapatan dari pekerjaan, yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat kemakmuran dalam memenuhi kebutuhan. Apabila kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, maka mereka termasuk dalam kategori miskin (Prasetyoningrum dan Sukmawati (2018)).

Indikator berikutnya yaitu indeks pembangunan manusia yang merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Rendah atau tingginya IPM akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, semakin rendah IPM maka tingkat produktivitas penduduk juga akan rendah kemudian produktivitas yang rendah akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan, begitu pula sebaliknya semakin tinggi IPM maka akan semakin tinggi tingkat produktivitas penduduk yang kemudian mendorong tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi. Dalam

penelitian Anggi Aprilia (2015) menjelaskan bahwa apabila terdapat kenaikan satu unit pada variabel indeks pembangunan manusia maka secara rata-rata akan menurunkan satu unit tingkat kemiskinan.

Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir penelitian pada gambar 2.1 maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah.